

## PENDAMPINGAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKUNTABILITAS PADA BUMDES PANDESARI UNIT KP SPAMS SUMBERSARI

***Assistance in Preparing Accountability-Based Financial Statements at BUMDes Pandesari KP SPAMS Sumbersari Unit***

**Hendrik Suhendri<sup>1\*</sup>**

**Agnes Quartina**

**Pudjiastuti<sup>1</sup>**

**Eugeniesia Yuliani Rikarti<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Tribhuwana  
Tunggadewi, Malang

### **Abstrak**

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan instrumen strategis dalam mendorong pembangunan ekonomi desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pengelolaan BUMDes sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan. BUMDes Pandesari yang berlokasi di Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, melalui unit usaha KP SPAMS Sumbersari yang bergerak di bidang pengelolaan air bersih, masih menghadapi berbagai permasalahan dalam penyusunan laporan keuangan. Permasalahan tersebut meliputi pencatatan transaksi yang belum sistematis, keterlambatan pelaporan, penggunaan format laporan yang tidak baku, serta keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam memahami prinsip-prinsip akuntansi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan BUMDes melalui pendampingan penyusunan laporan keuangan yang terstruktur dan berstandar. Metode pelaksanaan meliputi sosialisasi mengenai pentingnya akuntabilitas keuangan, pelatihan dasar akuntansi yang relevan dengan kebutuhan unit usaha, pendampingan praktik pencatatan transaksi keuangan yang terjadi secara nyata, serta evaluasi dan monitoring terhadap hasil penyusunan laporan keuangan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam pemahaman pengelola terhadap siklus akuntansi, mulai dari pencatatan transaksi hingga penyusunan laporan keuangan sederhana. Laporan keuangan yang dihasilkan menjadi lebih rapi, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, kegiatan ini juga meningkatkan kesadaran pengelola terhadap pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan unit usaha desa. Pendampingan ini diharapkan dapat menjadi model yang berkelanjutan dan dapat direplikasi pada BUMDes maupun unit usaha desa lainnya dalam rangka memperkuat tata kelola keuangan berbasis akuntabilitas publik.

\*email: [h3ndr1k5g5@gmail.com](mailto:h3ndr1k5g5@gmail.com)

### **Kata Kunci:**

Pendampingan  
Laporan keuangan  
Akuntabilitas  
BUMDes  
KP SPAMS

### **Keywords:**

Assistance  
Financial statements  
Accountability  
BUMDes  
KP SPAMS

### **Abstract**

Village-Owned Enterprises (BUMDes) play a strategic role in promoting rural economic development and improving community welfare. The success of BUMDes management is strongly influenced by the quality of accountable and transparent financial governance. BUMDes Pandesari, located in Pujon District, Malang Regency, through its business unit KP SPAMS Sumbersari engaged in clean water management, still faces various challenges in financial reporting. These challenges include unsystematic transaction recording, delays in reporting, non-standardized financial report formats, and limited human resource capacity in understanding basic accounting principles. This community service activity aims to enhance the accountability of BUMDes financial management through assistance in preparing structured and standardized financial statements. The implementation methods include socialization on the importance of financial accountability, basic accounting training tailored to the needs of the business unit, hands-on assistance in recording actual financial transactions, as well as evaluation and monitoring of the financial reporting outcomes. The results indicate a significant improvement in managers' understanding of the accounting cycle, from transaction recording to the preparation of simple financial statements. The resulting financial reports are more organized, timely, and accountable. In addition, this activity increases managers' awareness of the importance of transparency and accountability in managing village business finances. This assistance program is expected to serve as a sustainable and replicable model for other BUMDes and village business units in strengthening public accountability-based financial governance.



© year The Authors. Published by **Penerbit Forind**. This is Open Access article under the CC-BY-SA License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>). Link: <https://jurnal.forindpress.com/index.php/jamas>

Submit: 19-01-2026

Accepted: 01-02-2026

Published: 04-02-2026

## **PENDAHULUAN**

Pembangunan desa pada era desentralisasi tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada penguatan kelembagaan ekonomi desa yang berkelanjutan. Salah satu instrumen penting dalam

pembangunan ekonomi desa adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang dibentuk untuk mengelola potensi ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara kolektif. Keberadaan BUMDes diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi

desa dengan prinsip profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas (Suhendri et al., 2023). Pengelolaan BUMDes harus dilakukan secara profesional dan bertanggung jawab, terutama dalam aspek pengelolaan keuangan, mengingat dana yang dikelola bersumber dari desa dan masyarakat. Akuntabilitas keuangan merupakan kewajiban pengelola BUMDes untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana dan hasil kegiatan usaha kepada pemerintah desa dan masyarakat (Putra et al., 2024). Akuntabilitas menjadi prinsip utama dalam tata kelola BUMDes karena berhubungan langsung dengan kepercayaan publik. Pengelolaan keuangan yang akuntabel ditandai dengan adanya pencatatan yang tertib, pelaporan yang transparan, serta kesesuaian dengan ketentuan dan kebutuhan pemangku kepentingan (Handayani et al., 2025).

Dalam praktiknya, banyak BUMDes yang telah memiliki unit usaha strategis dan berpotensi memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan desa. Namun, tantangan utama yang masih dihadapi adalah lemahnya tata kelola keuangan, khususnya dalam penyusunan laporan keuangan yang andal dan sesuai standar. Laporan keuangan tidak hanya berfungsi sebagai alat administrasi, tetapi juga sebagai sarana pertanggungjawaban kepada masyarakat desa, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya (Mardiasmo, 2018).

BUMDes Pandesari yang terletak di Kecamatan Pujon Kabupaten Malang merupakan salah satu BUMDes yang cukup aktif dalam mengelola berbagai unit usaha. Salah satu unit usaha yang bersinggungan langsung dengan pelayanan publik adalah KP SPAMS Sumbersari, yang bergerak dalam pengelolaan dan distribusi air bersih bagi masyarakat desa. Unit usaha ini memiliki karakteristik transaksi yang relatif tinggi dan rutin, seperti penerimaan pembayaran pelanggan, pengeluaran biaya operasional, pemeliharaan sarana prasarana, serta pembayaran honor atau gaji pegawai.

Tingginya intensitas transaksi tersebut menuntut adanya sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang tertib, sistematis, dan akuntabel. Namun, berdasarkan hasil wawancara, observasi awal dan diskusi dengan perangkat desa dan pengurus BUMDes, diketahui bahwa penyusunan laporan keuangan KP SPAMS Sumbersari masih dilakukan secara manual dengan format yang sederhana dan belum baku. Pencatatan transaksi sering kali tidak dilakukan secara rutin, sehingga menyebabkan keterlambatan penyusunan laporan dan potensi terjadinya kesalahan pencatatan.

Permasalahan tersebut tidak terlepas dari keterbatasan kapasitas sumber daya manusia pengelola. Sebagian besar pengelola KP SPAMS Sumbersari berasal dari masyarakat desa dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman yang belum memadai di bidang akuntansi. Pemahaman terhadap konsep dasar seperti jurnal umum, buku besar, laporan laba rugi, dan neraca masih sangat terbatas. Selain itu, minimnya pelatihan dan pendampingan dari pihak eksternal menyebabkan pengelola kesulitan mengikuti perkembangan regulasi dan praktik pelaporan keuangan yang baik.

Kondisi ini jika dibiarkan berlarut-larut dapat berdampak negatif terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BUMDes dan unit usahanya. Laporan keuangan yang tidak transparan dan tidak akuntabel berpotensi menimbulkan kecurigaan, konflik internal, bahkan risiko penyalahgunaan dana (Maimuna et al., 2025). Oleh karena itu, diperlukan upaya nyata untuk memperkuat kapasitas pengelola BUMDes melalui kegiatan pendampingan penyusunan laporan keuangan berbasis akuntabilitas. Pendampingan merupakan upaya peningkatan kapasitas pengelola BUMDes melalui pelatihan dan bimbingan teknis yang berkelanjutan. Melalui pendampingan penyusunan laporan keuangan, pengelola BUMDes tidak hanya memperoleh pemahaman dasar akuntansi, tetapi juga mampu menerapkannya dalam praktik pengelolaan keuangan sehari-hari (Herli et al., 2023). Pendampingan

ini diharapkan dapat memperkuat akuntabilitas, meningkatkan kualitas laporan keuangan, serta mendorong tata kelola BUMDes yang lebih transparan dan berkelanjutan.

Kebaruan kegiatan pengabdian kepada masyarakat tematik (PMT) ini terletak pada pengembangan dan penerapan model pendampingan penyusunan laporan keuangan berbasis akuntabilitas publik yang kontekstual dan aplikatif pada unit usaha pelayanan publik BUMDes, khususnya KP SPAMS Sumbersari yang bergerak di sektor pengelolaan air bersih. Selama ini, sebagian besar kegiatan pendampingan BUMDes masih berfokus pada aspek administratif dan pelatihan umum, tanpa mempertimbangkan karakteristik transaksi dan tuntutan akuntabilitas pada unit usaha berbasis layanan publik.

Kegiatan PMT ini menghadirkan kebaruan melalui integrasi sistematis antara penguatan kapasitas sumber daya manusia, standarisasi format laporan keuangan, serta pendampingan langsung pencatatan transaksi riil, sehingga pendampingan tidak berhenti pada transfer pengetahuan, tetapi menghasilkan luaran berupa laporan keuangan sederhana yang siap digunakan sebagai instrumen pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan pengelola BUMDes.

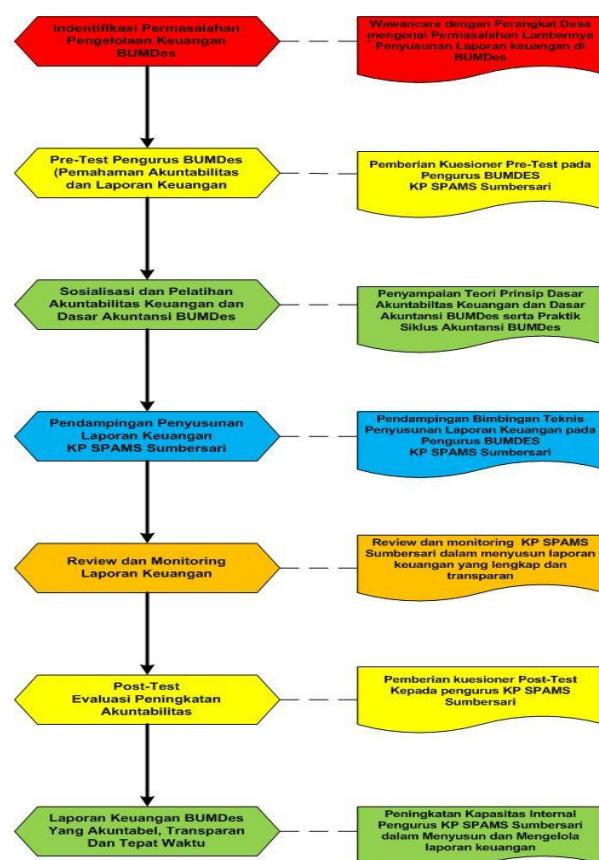
Selain itu, kegiatan PMT ini menawarkan pendekatan pendampingan berbasis akuntabilitas publik yang menekankan transparansi, ketepatan waktu pelaporan, dan keterpisahan keuangan unit usaha, yang masih jarang diterapkan secara konsisten pada BUMDes sektor air bersih. Pendekatan ini memperkuat tata kelola keuangan desa dengan menghubungkan praktik akuntansi sederhana dengan prinsip akuntabilitas publik yang relevan bagi masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama.

Dengan demikian, kebaruan PMT ini tidak hanya terletak pada objek dan konteks kegiatan, tetapi juga pada model pendampingan yang bersifat implementatif, berorientasi luaran, dan berpotensi direplikasi pada

BUMDes serta unit usaha desa lainnya yang memiliki karakteristik pelayanan publik serupa.

## METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang secara sistematis dan berkelanjutan melalui tujuh tahapan utama yang saling terintegrasi.



**Gambar I. Tahapan Kegiatan Pengabdian**

Tahap kesatu, tahapan ini dilakukan wawancara dengan Perangkat Desa dan salahsatu pengurus BUMDes Pandesari Unit KP SPAMS Sumbersari mengenai kendala dan permasalahan lambannya penyusunan laporan keuangan di BUMDes. Tahap kedua, tahapan diawali dengan pengukuran kondisi awal (*baseline*) melalui *pre-test* untuk memetakan tingkat pemahaman pengurus BUMDes terkait akuntabilitas dan penyusunan laporan keuangan. Hasil *pre-test* digunakan sebagai dasar perancangan materi sosialisasi dan pelatihan yang sesuai

dengan kebutuhan riil pengelola BUMDes. Pre-test diberikan kepada lima orang pengurus BUMDes dalam bentuk kuesioner tertutup dan terbuka.

Tahap ketiga, sosialisasi dan Pelatihan Akuntabilitas dan Dasar Akuntansi BUMDes. Kegiatan ini dilaksanakan melalui pertemuan tatap muka dengan pengurus BUMDes Pandesari. Materi yang disampaikan meliputi konsep akuntabilitas keuangan, prinsip dasar akuntansi, pencatatan transaksi, serta penyusunan laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas. Selain penyampaian materi secara teoritis, kegiatan ini juga dilengkapi dengan praktik langsung penyusunan laporan keuangan menggunakan data transaksi riil BUMDes.

Tahap keempat, Pendampingan penyusunan laporan keuangan pada unit usaha KP SPAMS Sumbersari. Pendampingan dilakukan secara intensif melalui bimbingan teknis pencatatan transaksi pemasukan dan pengeluaran, penataan dokumen keuangan, serta penyusunan laporan keuangan periodik. Tahap kelima, review dan monitoring laporan keuangan. Tim pendamping melakukan review terhadap data keuangan yang telah disusun untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kemudahan pemahaman bagi pemangku kepentingan. Tahap keenam, pelaksanaan *post-test* untuk mengevaluasi peningkatan pemahaman dan kemampuan pengurus BUMDes setelah kegiatan pendampingan. Tahap ketujuh. Pengurus secara mandiri menyusun laporan keuangan BUMDes yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu.



**Gambar 2. Dokumentasi Kegiatan Pengabdian**

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah dilaksanakannya kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan penyusunan laporan keuangan, pengurus KP SPAMS Sumbersari menunjukkan peningkatan kemampuan yang signifikan dalam mengelola dan melaporkan keuangan unit usaha. Hal ini sejalan dengan dampak pengabdian Masyarakat yang telah dilakukan oleh (Herli et al., 2023). Pengurus telah mampu melakukan pencatatan transaksi keuangan secara tertib, sistematis, dan berkelanjutan, baik untuk transaksi penerimaan maupun pengeluaran. Pencatatan tersebut menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan periodik yang lebih rapi dan mudah dipahami.

Dari sisi akuntabilitas, laporan keuangan yang disusun oleh pengurus KP SPAMS Sumbersari telah mencerminkan pertanggungjawaban pengelolaan dana kepada pemerintah desa dan masyarakat. Pengurus memahami bahwa setiap transaksi keuangan harus dapat dijelaskan dan didukung oleh bukti yang sah. Hal ini menunjukkan adanya perubahan pola pikir dari sekadar pencatatan administratif menjadi kesadaran akan pentingnya pertanggungjawaban publik. Kesadaran ini sejalan dengan hasil riset (Lestari & Sulkiah, 2025) bahwa perilaku akuntabel akan berdampak pada penyusunan laporan keuangan BUMDes yang transparan dan tepat waktu.

Aspek transparansi juga mengalami peningkatan, di mana laporan keuangan disusun dengan format yang jelas dan terbuka sehingga dapat diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Ini juga sejalan dengan hasil riset (Lestari & Sulkiah, 2025). Pengurus menyadari bahwa keterbukaan informasi keuangan merupakan kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan layanan air bersih yang dikelola oleh KP SPAMS Sumbersari.

Selain itu, pengurus telah mampu menyusun laporan keuangan secara tepat waktu sesuai periode pelaporan yang ditetapkan. Ketepatan waktu ini menunjukkan adanya peningkatan disiplin administrasi serta

pemahaman terhadap siklus pelaporan keuangan. Dengan kemampuan tersebut, KP SPAMS Sumbersari diharapkan dapat menerapkan tata kelola keuangan yang lebih profesional dan berkelanjutan. Peningkatan kemampuan, pengetahuan dan kesadaran tersebut ditunjukkan dengan Hasil post-test menunjukkan peningkatan signifikan, di mana seluruh pengurus memahami kewajiban penyusunan laporan keuangan, prinsip dasar laporan keuangan yang baik, serta waktu penyusunan laporan keuangan yang tepat. Jawaban esai juga menunjukkan bahwa mayoritas pengurus menyadari pentingnya akuntabilitas dalam menjaga kepercayaan masyarakat, mampu mengidentifikasi jenis laporan keuangan utama, serta memahami peran masyarakat dalam pengawasan dan keberlanjutan pengelolaan BUMDes.

## RENCANA TINDAK LANJUT

Rencana tindak lanjut disusun untuk menjamin keberlanjutan hasil kegiatan pengabdian melalui penguatan akuntabilitas pengelolaan keuangan BUMDes Pandesari, khususnya Unit KP SPAMS Sumbersari. Tindak lanjut ini bertujuan memastikan kemampuan yang telah diperoleh pengurus dapat diterapkan secara konsisten dan berkelanjutan.

BUMDes Pandesari akan menerapkan format laporan keuangan baku yang digunakan secara rutin dalam pencatatan transaksi serta penyusunan laporan keuangan bulanan dan tahunan. Selain itu, monitoring dan evaluasi berkala akan dilakukan untuk menilai kelengkapan pencatatan, ketepatan waktu pelaporan, serta kesesuaian laporan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Pengurus KP SPAMS Sumbersari juga didorong untuk melakukan dokumentasi dan pengarsipan bukti transaksi secara tertib guna mendukung pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan.

Sebagai penguatan lanjutan, BUMDes Pandesari diharapkan mengembangkan peningkatan kapasitas

melalui pelatihan atau pendampingan tambahan, termasuk pemanfaatan teknologi informasi sederhana. Dengan pelaksanaan rencana tindak lanjut ini, pengelolaan keuangan BUMDes Pandesari Unit KP SPAMS Sumbersari diharapkan semakin akuntabel, transparan, dan profesional serta mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat secara berkelanjutan.

## KESIMPULAN

Pendampingan penyusunan laporan keuangan berbasis akuntabilitas pada BUMDes Pandesari Unit KP SPAMS Sumbersari terbukti efektif dalam meningkatkan kemampuan pengurus dalam mengelola dan melaporkan keuangan unit usaha desa. Melalui tujuh tahapan kegiatan yang dilakukan, pengurus mampu menyusun laporan keuangan yang lebih sistematis, akuntabel, transparan, dan tepat waktu, serta menunjukkan peningkatan pemahaman dan penerapan prinsip akuntabilitas dalam praktik pencatatan dan pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang dihasilkan menjadi lebih tertib, mudah dipahami, dan layak digunakan sebagai alat pertanggungjawaban kepada pemerintah desa dan masyarakat, sehingga berkontribusi langsung terhadap penguatan tata kelola keuangan dan peningkatan kepercayaan publik. Dengan demikian, pendampingan penyusunan laporan keuangan dapat dinyatakan sebagai strategi yang relevan dan aplikatif dalam mendorong akuntabilitas pengelolaan BUMDes dan berpotensi direplikasi pada unit usaha desa lainnya guna mewujudkan tata kelola keuangan desa yang profesional dan berkelanjutan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Desa Pandesari atas dukungan dan kerja sama yang diberikan selama pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh pengurus BUMDes KP SPAMS Sumbersari yang telah berpartisipasi aktif dan

kooperatif dalam setiap tahapan kegiatan, sehingga pendampingan dapat terlaksana dengan baik. Selain itu, apresiasi diberikan kepada masyarakat Desa Pandesari atas dukungan dan keterbukaan selama kegiatan berlangsung. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Tribhuwana Tunggadewi atas fasilitasi, pendampingan, dan dukungan institusional yang memungkinkan terlaksananya kegiatan ini dengan optimal.

## REFERENSI

- Handayani, A., Anisa, A., Purwasih, D., & Rosharlanti, Z. (2025). Determinant Factors Enhancing the Financial Accountability of Village-Owned Enterprises. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 15(6), 773–781. <https://doi.org/10.32479/ijefi.21703>
- Herli, M., Purwanto, E., Hafidhah, Kuswardhini, S. D., & Sya'bana, R. D. (2023). Pelatihan penyusunan laporan keuangan untuk menciptakan akuntabilitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *BERDAYA: Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 85–94. <https://doi.org/10.36407/berdaya.v5i1.957>
- Lestari, T. F., & Sulkiah, S. (2025). The Influence of Transparency and Accountability on the Financial Management of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in Suralaga Subdistrict. *JASA (Jurnal Akuntansi, Audit Dan Sistem Informasi Akuntansi)*, 9(1), 228–240. <https://doi.org/10.36555/jasa.v9i1.2816>
- Maimuna, Y., Adriani, U., Limbong, D., Wahud, F., & Musa, M. (2025). Evaluating the Implementation of Accounting Practices in Village-Owned Enterprises (BUMDes) in Indonesia: A Case Study of Awunio Village Under SAK EMKM Financial Reporting. *Journal of Regional Economics Indonesia*, 6(1), 47–54. <https://doi.org/10.26905/jrei.v6i1.15243>
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Putra, N. B., Rusliyawati, Damayanti, F., & Ardimansyah. (2024). Uncovering the Meaning of Accountability: Is the Village-Owned Enterprises (BUMDes) Accountable? *Jurnal Pendidikan Akuntansi Dan Keuangan*, 12(1), 55–68. <https://ejournal.upi.edu/index.php/JPAK/article/view/62945/25780>
- Suhendri, H., Hardianto, T. W., Handayanto, A. J., & Tena, P. D. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Referensi: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akutansi*, 11(2), 16–24. <https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/refrensi/article/view/5002/pdf>